LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



KEHUMASAN SEBAGAI PILAR KOMUNIKASI PUBLIK DALAM UPAYA MEMBANGUN CITRA POSITIF INSTANSI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

NAMA	**: PUTU ANDI PRAYOGA, S.Kom.**
NIP	**: 199412292019011001**
JABATAN	**: PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI**
SATUAN KERJA	**: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI**

PELATIHAN IMPACTFUL COMMUNICATION

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

A. Pendahuluan

1. Umum

Komunikasi memiliki peran sentral dalam membangun hubungan antara institusi pemerintah dan masyarakat. Dalam era digital saat ini, setiap tindakan dan ucapan aparatur sipil negara, khususnya peran Humas (Hubungan Masyarakat), dapat secara cepat diketahui dan dinilai publik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi komunikasi menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan citra positif instansi, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Dalam era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, peran kehumasan menjadi sangat strategis untuk menjaga citra dan reputasi sebuah institusi, khususnya lembaga pemerintahan. Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, humas bukan hanya sekadar pelaksana tugas komunikasi, tetapi merupakan garda terdepan dalam membentuk persepsi publik terhadap instansi.

Setiap informasi, pernyataan, maupun layanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara akan dengan cepat direspons masyarakat, baik melalui media konvensional maupun digital. Oleh sebab itu, kemampuan komunikasi publik yang berdampak, tepat sasaran, dan beretika menjadi kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap insan humas.

Komunikasi yang efektif tidak hanya mencakup kemampuan menyampaikan pesan, namun juga bagaimana pesan tersebut dipahami, diterima, dan membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, peran Humas Kanwil Kemenkum Bali perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan komunikasi yang relevan dengan tuntutan zaman.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan hasil implementasi pelatihan *Impactful Communication* yang telah diikuti. Pelatihan tersebut bertujuan membekali peserta dengan kemampuan komunikasi yang relevan, tak hanya dalam konteks penyampaian informasi, tetapi juga dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas institusi di mata publik.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat diuraikan secara jelas maksud dan arah penerapan ilmu yang telah diperoleh, sekaligus mengevaluasi efektivitasnya dalam memperkuat peran strategis kehumasan sebagai pilar utama komunikasi publik instansi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

3. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup penerapan materi pelatihan terkait dasar-dasar komunikasi, keterampilan *public speaking*, dan prinsip komunikasi publik dalam pelaksanaan tugas-tugas kehumasan, khususnya dalam pelayanan, penanganan media, dan komunikasi di *platform digital*.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan *Impactful Communication*, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan implementatif yang berfokus pada penguatan kualitas komunikasi publik dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi diarahkan pada praktik yang berdampak langsung terhadap peningkatan citra institusi. Berikut uraian kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Penerapan Prinsip Komunikasi Dua Arah dalam Layanan Publik

Langkah pertama yang diimplementasikan adalah penerapan prinsip komunikasi dua arah dalam setiap bentuk interaksi layanan publik. Komunikasi dua arah ini diterapkan secara aktif di loket Pelayanan Terpadu Besama, hingga pada layanan digital melalui saluran WhatsApp dan media sosial resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Petugas Humas dilatih untuk tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga membuka ruang dialog dengan masyarakat, memberikan kesempatan kepada publik untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan umpan balik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih partisipatif, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat secara lebih akurat. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya kepuasan layanan serta menurunnya potensi miskomunikasi yang dapat merugikan citra instansi.

2. Penyusunan Pesan Institusional yang Profesional dan Konsisten di Media Sosial

Sebagai wujud konsistensi komunikasi eksternal, tim Humas secara aktif menyusun dan mengelola pesan-pesan institusional yang dipublikasikan melalui akun media sosial resmi Kanwil Kemenkum Bali. Penyusunan konten dilakukan dengan pendekatan profesional, menggunakan bahasa yang representatif, visualisasi yang komunikatif, serta narasi yang mencerminkan nilai-nilai integritas, pelayanan, dan keterbukaan.

Pesan-pesan yang disusun tidak hanya bersifat informatif, namun juga membangun narasi positif tentang kegiatan, kebijakan, dan pelayanan instansi. Setiap unggahan diperiksa agar selaras dengan citra institusi dan tidak menimbulkan interpretasi ganda yang berisiko menimbulkan opini negatif. Aktivitas ini terbukti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

meningkatkan *engagement* masyarakat di media sosial serta memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

3. Simulasi *Internal Public Speaking* Berbasis Struktur Presentasi Efektif (GISI)

   Untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, kegiatan simulasi *public speaking internal* telah dilaksanakan secara berkala. Kegiatan ini diikuti oleh anggota tim kerja bidang kehumasan dan kerjasama dan difokuskan pada penggunaan struktur presentasi efektif yang diperkenalkan dalam pelatihan, yaitu GISI, antara lain: *Greeting* (sapaan awal), *Introduce* (perkenalan isi/topik), *Storytelling* (penjabaran dengan pendekatan naratif yang menarik), dan *Interaction* (keterlibatan audiens).

   Simulasi dilakukan dalam berbagai skenario, mulai dari konferensi pers, dialog publik, hingga situasi darurat komunikasi. Hasilnya, tim kehumasan Kantor Wilayah menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pesan kepada publik dan mampu menjaga alur komunikasi yang menarik dan efektif. Kegiatan ini juga membantu memperkuat penyampaian pesan institusi secara persuasif dan terstruktur.

4. Penguatan Etika Komunikasi dalam Situasi Kritis

   Kegiatan terakhir yang menjadi penekanan adalah penguatan aspek etika komunikasi, khususnya dalam menghadapi situasi yang sensitif atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Dalam hal ini, Humas diarahkan untuk selalu mengedepankan sikap empatik, netral, dan sopan dalam menyampaikan tanggapan, baik secara langsung maupun melalui media digital.

   Setiap komunikasi diarahkan agar tidak menyinggung pihak tertentu, menghindari opini pribadi yang kontraproduktif, serta menjaga nama baik institusi. Dalam beberapa kasus pengaduan publik, penerapan etika komunikasi yang tepat telah membantu menurunkan eskalasi konflik, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, dan meningkatkan reputasi institusi sebagai lembaga yang profesional dan terbuka terhadap kritik.

   Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan integrasi langsung antara materi pelatihan dan praktik kehumasan di lapangan. Implementasi ini juga menjadi langkah konkret dalam menjadikan kehumasan sebagai pilar utama komunikasi publik yang strategis, terukur, dan berdampak dalam membangun citra positif Kantor Wilayah Kemenkum Bali.

C. Hasil yang Dicapai

Pelaksanaan kegiatan implementatif pasca pelatihan *Impactful Communication* telah menunjukkan sejumlah hasil nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas komunikasi publik dan citra institusi. Hasil-hasil tersebut merupakan indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

bahwa peran kehumasan sebagai ujung tombak komunikasi telah berjalan secara lebih efektif, profesional, dan terarah. Berikut uraian hasil yang berhasil dicapai, antara lain:

1. Peningkatan Kepercayaan Diri Pegawai Humas dalam Berkomunikasi Publik

   Salah satu capaian awal yang paling terlihat adalah meningkatnya rasa percaya diri tim humas ketika tampil di hadapan publik, maupun media digital. Melalui simulasi *public speaking* dan penerapan struktur presentasi GISI, tim humas kini mampu menyampaikan informasi dengan artikulasi yang jelas, runtut, serta disampaikan dengan bahasa tubuh yang meyakinkan.

   Keberanian untuk berbicara di ruang publik tidak hanya berdampak pada efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga pada persepsi publik terhadap kesiapan dan profesionalitas pegawai dalam mewakili institusi. Kepercayaan diri ini menjadi aset penting dalam situasi yang menuntut keterlibatan langsung dengan masyarakat, termasuk saat menangani pertanyaan media atau aduan masyarakat secara langsung.

2. Pengurangan Tingkat Miskomunikasi dalam Pelayanan Informasi

   Dengan diterapkannya prinsip komunikasi dua arah dalam pelayanan publik, diharapkan dapat menurunkan intensitas terhadap kasus-kasus miskomunikasi yang sebelumnya kerap menimbulkan ketidakpuasan atau kesalahpahaman dari masyarakat. Tim humas tidak hanya menyampaikan informasi secara pasif, tetapi juga aktif mendengarkan kebutuhan dan masukan dari pengguna layanan.

   Kegiatan ini membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh masyarakat, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik. Hasilnya adalah interaksi layanan yang lebih humanis, serta penurunan potensi konflik atau aduan yang disebabkan oleh kesalahan komunikasi.

3. Peningkatan Kualitas dan Konsistensi Konten Media Sosial

   Konten-konten media sosial resmi Kanwil Kemenkum Bali kini menunjukkan peningkatan, baik dari sisi struktur pesan, desain visual, maupun *tone* komunikasi. Pesan yang disampaikan melalui kanal digital menjadi lebih informatif, membangun narasi positif, dan sejalan dengan nilai-nilai institusi.

   Unggahan tidak hanya berisi laporan kegiatan, tetapi juga konten edukatif, kampanye layanan, serta narasi-narasi inspiratif yang membangun koneksi emosional dengan masyarakat. Konsistensi dalam pengemasan konten ini memperkuat identitas visual dan pesan lembaga, serta meningkatkan daya jangkau informasi secara lebih luas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

4. Peningkatan Respons Positif dan Penurunan Tingkat Aduan

Implementasi pendekatan komunikasi yang lebih terbuka, empatik, dan responsif berbanding lurus dengan peningkatan respons positif dari masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya *engagement* di media sosial seperti like, komentar konstruktif, dan penyebaran konten oleh warganet secara organik.

Selain itu, data internal menunjukkan penurunan jumlah aduan publik yang berkaitan dengan ketidakjelasan informasi atau respons yang kurang tepat dari petugas layanan. Capaian ini menunjukkan bahwa komunikasi publik yang efektif telah berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

5. Terbentuknya Budaya Komunikasi Profesional di Lingkungan Humas

Hasil strategis lainnya yang tak kalah penting adalah mulai terbentuknya budaya komunikasi yang lebih profesional di lingkungan Humas. Para pegawai menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menjaga etika dalam komunikasi, termasuk dalam penggunaan bahasa, nada bicara, dan sikap tubuh.

Sikap empatik, netral, dan santun kini menjadi prinsip dasar dalam berkomunikasi, baik kepada masyarakat maupun antarsesama pegawai. Budaya ini mencerminkan wajah institusi yang adaptif, terbuka terhadap perubahan, dan menjunjung tinggi prinsip pelayanan publik yang bermartabat.

Secara keseluruhan, hasil-hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pelatihan dan implementasi *Impactful Communication* bukan hanya memberikan peningkatan keterampilan individu, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan dalam membangun komunikasi publik yang lebih strategis. Humas kini benar-benar memainkan perannya sebagai pilar utama dalam memperkuat citra positif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di mata masyarakat.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan rangkaian kegiatan implementatif yang dilakukan setelah mengikuti pelatihan *Impactful Communication*, dapat disimpulkan bahwa upaya penguatan fungsi kehumasan sebagai pilar komunikasi publik telah memberikan dampak nyata dan strategis terhadap peningkatan citra positif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Peningkatan kompetensi komunikasi, baik dalam bentuk komunikasi langsung, publik, maupun digital, telah menghasilkan perbaikan dalam cara institusi menyampaikan informasi kepada publik. Komunikasi menjadi lebih terbuka, persuasif, dan berorientasi pada pemahaman, bukan sekadar penyampaian sepihak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lebih jauh, pendekatan komunikasi dua arah yang mulai diterapkan menunjukkan efektivitas dalam mereduksi miskomunikasi dan memperkuat relasi antara institusi dengan masyarakat. Media sosial sebagai kanal komunikasi eksternal pun telah dimanfaatkan secara lebih strategis, dengan kualitas konten yang meningkat dan konsisten mencerminkan nilai-nilai positif institusi.

Budaya komunikasi profesional yang mulai tumbuh di lingkungan kehumasan menunjukkan bahwa implementasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja yang lebih adaptif, empatik, dan komunikatif. Hal ini memperkuat posisi kehumasan sebagai garda terdepan dalam menjaga citra dan reputasi lembaga.

2. Saran

Agar keberhasilan implementasi ini dapat dijaga dan terus dikembangkan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali perlu engadakan pelatihan lanjutan yang bersifat teknis dan tematik, seperti manajemen krisis komunikasi, teknik penulisan berita yang berdampak, atau strategi komunikasi digital berbasis data, agar kapasitas Humas terus berkembang secara berkelanjutan.

Fungsi komunikasi publik tidak dapat dijalankan oleh Humas semata. Diperlukan koordinasi lintas bidang agar setiap unit kerja memahami pentingnya menjaga keseragaman pesan dan turut berkontribusi dalam membangun narasi kelembagaan yang positif dan utuh.

E. Penutup

Pelaksanaan implementasi hasil pelatihan *Impactful Communication* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menandai langkah nyata dalam memperkuat peran strategis kehumasan sebagai pilar utama komunikasi publik. Dalam dunia pemerintahan yang semakin terbuka dan dinamis, komunikasi bukan lagi sekadar alat penyampaian informasi, tetapi telah menjadi jembatan penting antara institusi dan masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari penerapan komunikasi dua arah, peningkatan kualitas public speaking, pengelolaan konten media sosial, hingga penguatan etika komunikasi, dapat dilihat bahwa kehumasan memiliki andil besar dalam membentuk persepsi publik yang positif terhadap lembaga.

Keberhasilan ini tidak hanya ditunjukkan oleh hasil yang terukur, seperti meningkatnya keterlibatan masyarakat dan menurunnya aduan, tetapi juga oleh tumbuhnya budaya komunikasi profesional yang mulai terinternalisasi di lingkungan kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Meskipun berbagai hasil telah dicapai, upaya ini tetap memerlukan kesinambungan dan dukungan dari seluruh unsur organisasi. Perlu adanya komitmen bersama untuk terus mengembangkan kapasitas komunikasi, membangun sinergi lintas unit kerja, serta menjadikan kehumasan sebagai mitra strategis dalam setiap pengambilan kebijakan komunikasi publik.

Demikian Laporan Hasil Implementasi Pelatihan *Impactful Communication* ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Denpasar
Pada tanggal 17 Juli 2025
Mengetahui,

Alumni,



Putu Andi Prayoga

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Nengah Sukadana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

NOTA DINAS
NOMOR: W.20-HH.01.02 - 4108

Yth.	: Tim Kerja Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
Dari	: Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Hal	: Undangan Rapat *Transfer Knowledge* Komunikasi yang Berdampak
Tanggal	: 16 Juli 2025

Dalam rangka meningkatkan kompetensi komunikasi dan berbagi pengetahuan terkait *Impactful Communication* / Komunikasi yang Berdampak dalam rangka meningkatkan citra positif instansi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal	:	Kamis, 17 Juli 2025
Pukul	:	14.00 WITA s.d selesai
Tempat	:	Ruang Nakula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali
Agenda	:	Rapat *Transfer Knowledge* Komunikasi yang Berdampak dalam rangka meningkatkan citra positif instansi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Nengah Sukadana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar 80234
Telepon: (0361) 228718, Faksimili: (0361) 228718
Laman: bali.kemenkum.go.id Pos-el: kanwilbali@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Juli 2025

Pukul :14.00 WITA – 15.00 WITA

Tempat : Ruang Nakula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Peserta Rapat

a. Hadir : 1. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
2. Tim Kerja Bidang Kehumasan dan Kerjasama

b. Berhalangan hadir : -

Acara : Rapat *Transfer Knowledge* Komunikasi yang Berdampak dalam rangka meningkatkan citra positif instansi

Jalannya rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana yang menyampaikan pengantar terkait pentingnya komunikasi yang efektif sebagai fondasi dalam menjalankan peran kehumasan, khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Beliau menekankan bahwa komunikasi yang tepat dan profesional sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap instansi;
2. Selanjutnya, kegiatan rapat dilanjutkan dengan inti pembahasan yang disampaikan oleh Putu Andi Prayoga selaku Alumni Peserta Pelatihan Impactful Communication Tahun 2025, Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan kembali esensi pelatihan kepada rekan-rekan kerja di bidang Humas, guna meningkatkan pemahaman akan pentingnya komunikasi yang efektif dan strategis dalam membangun citra positif instansi di mata masyarakat;
3. Ditekankan bahwa pelayanan yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan penerimaan umpan balik dari masyarakat. Komunikasi dua arah akan memperkuat kepercayaan publik dan meminimalisir kesalahpahaman;
4. Dalam rapat juga dijelaskan terkait struktur presentasi efektif dengan konsep GISI, untuk menunjang efektivitas komunikasi lisan, terutama saat memberikan informasi di depan publik atau media. Struktur GISI yang dimaksud antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Greeting (sapaan pembuka), *Introduce* (perkenalan topik), *Storytelling* (pembahasan menarik dengan narasi), *Interaction* (mengajak audiens terlibat);

5. Disampaikan pula pentingnya menyajikan informasi dalam bentuk infografis yang komunikatif dan visual menarik di media sosial resmi instansi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan *engagement* positif dari masyarakat serta menurunkan tingkat pengaduan akibat miskomunikasi;
6. Rapat ditutup dengan harapan agar seluruh peserta, khususnya tim kerja bidang Humas dan Kerjasama, dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran ini dalam tugas-tugas kehumasan sehari-hari. Seluruh materi disambut baik dan akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah praktis di masing-masing lini komunikasi.

Disahkan Oleh,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Notulis

Putu Andi Prayoga

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Nengah Sukadana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran Notula

DOKUMENTASI
KEGIATAN RAPAT *TRANSFER KNOWLEDGE* KOMUNIKASI YANG BERDAMPAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN CITRA POSITIF INSTANSI

1. Pengarahan umum Pimpinan Rapat



2. Pelaksanaan Rapat *Transfer Knowledge* Komunikasi yang Berdampak dalam rangka meningkatkan citra positif instansi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi





Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
I Nengah Sukadana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar 80234
Kotak Pos 64, Telp. (0361) 228718, Fax (0361) 228718
Laman: bali.kemenkum.go.id Pos-el: kanwilbali@kemenkum.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT *TRANSFER KNOWLEDGE* KOMUNIKASI YANG BERDAMPAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN CITRA POSITIF INSTANSI

KAMIS, 17 JULI 2025

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	I Nengah Sukadana NIP 197703042001121002	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	
2	Putu Andi Prayoga NIP 199412292019011001	Pengelola Teknologi Informasi	
3	Ade Novianti Putri NIP 199511272020122001	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	
4	Ida Bagus Ketut Rendy Pramudhita NIP 199305092012121001	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	
5	I Eka Agustina NIP 198808192010121004	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	
6	Ida Bagus Gede Pradnya Eka Adnyana P NIP 200201092022031004	Petugas Protokol	
7	I Made Dwilaksana Putra NIP 199501062025061005	Pranata Komputer Ahli Pertama	
8	Ni Luh Adriani NIP 199312272019012001	Pengelola Jaringan Dokumentasi	
9	Kadek Anditasari NIP 197208122002121001	Analis Pengaduan Masyarakat	
10	Luthfia Nur Arifah Kusumaningrum NIP 199603182019012001	Penata Keuangan	
11	Anak Agung Gde Bayu Putra Pemayun NIP 199402072019011001	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	
12	I Gede Sudiatmika NIP 198605222014021002	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum,

I Nengah Sukadana